

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pemerintah desa Oluhuta Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas yang diterapkan di Desa Oluhuta masih tergolong rendah. Dari ketujuh laporan yang ada, hanya dua bagian sudah sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Bagian yang sesuai adalah Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Sedangkan untuk beberapa bagian lainnya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), Buku Kas Pembantu Kegiatan, Penatausahaan, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa masih terdapat bagian-bagian yang tidak diisi bahkan salah dalam pengisian. Hal ini juga dipengaruhi oleh ketidakterdediaannya data di lapangan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti menyarankan agar aparat desa dan pemerintah Desa Oluhuta lebih baik lagi dalam melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Alokasi Dana Desa (ADD) termasuk dalam penyimpanan file maupun berkas penting terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dana desa minimal selama 5 tahun.

Tidak hanya itu, berdasarkan data yang diperoleh lapangan, masih ditemukannya ketidaktahuan aparatur desa dalam mengisi format laporan mengenai Alokasi Dana Desa Tersebut sehingga disarankan untuk instansi terkait perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan kembali mengenai tata cara pengisian format laporan Alokasi Dana Desa. Usahakan sosialisasi dan pelatihan pengisian format tentang Alokasi Dana Desa tidak hanya diperuntukkan bagi aparatur desa saja, melainkan untuk masyarakat sekitar juga dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bagaimana pengalokasian dana desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah (Rangkuman 7 UU, 30 PP dan 15 Permendagri)*. Jakarta : Kembangan.
- Halim, Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, dkk. 2014 *Ensiklopedi Pengetahuan Sosial Jilid 1*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- Putra, Chandra Kusuma, Ratih Nur Partiw, Suwondo. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorodjo Kecamatan Singosasi Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6. (jurnal).
- Rosalinda, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya: Malang. (skripsi).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni, Murti dan Salamah Wahyuni. 2005. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Sutabri. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi.
- Terry, Rue. 2005. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya 'Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun*

2008 tentang Kecamatan dan Persatuan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan' Yogyakarta: Pustaka mahadika.

Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Desa "Merupaka Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh"*. Jakarta: Pajar Interpretama Offset.